

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI S1 HUKUM KELUARGA ISLAM



LEMBAGA PENJAMIN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN
2025

A. Kriteria Audit

Kategori	No	Standar
Pendidikan	1	Standar Luaran Pendidikan
	2	Standar Proses Pendidikan
	3	Standar Masukan Pendidikan
Penelitian	4	Standar Luaran Penelitian
	5	Standar Proses Penelitian
	6	Standar Masukan Penelitian
PKM	7	Standar Luaran PkM
	8	Standar Proses PkM
	9	Standar Masukan PkM

B. Rincian Temuan dan upaya tindak lanjut

No	Temuan	Upaya Tindak Lanjut Auditee	Konfirmasi Tindak Lanjut (Ya/Tidak) disertai bukti
1	Tidak ada bukti bahwa seluruh mahasiswa telah mendapatkan kesempatan belajar yang benar-benar setara tanpa diskriminasi apa pun dalam setiap tahapan proses pembelajaran	koordinasi dengan pimpinan Dekan dan Awrek Akademik terkait Kebijakan anti diskriminasi dan perlindungan mahasiswa pada kegiatan akademik dan SOP antidiskriminasi dan perlindungan mahasiswa	Menindaklanjuti koordinasi dengan Dekan dan Wakil Rektor Bid. Akademik dan memfinalkan kebijakan serta SOP anti-diskriminasi dan perlindungan mahasiswa
2	Tidak bukti bahwa kampus telah menyediakan jaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh sivitas akademika, termasuk sistem pencegahan dan penanganan kekerasan serta diskriminasi	Koordinasi dengan pimpinan dekan dan Warek terkait Kebijakan keamanan dan antikekerasan pada seluruh civitas akademika baik kegiatan akademik/ non akademik dan SOP keamanan & anti kekerasan	Koordinasi dengan pimpinan Dekan dan Warek terkait Kebijakan Keamanan dan Anti-Kekerasan pada seluruh civitas akademika, baik kegiatan akademik maupun nonakademik, serta penyusunan SOP Keamanan dan Anti-Kekerasan
3	Tidak ada bukti bahwa mahasiswa telah difasilitasi untuk menyelesaikan studi secara fleksibel (tatap muka, daring, kombinasi, alur kurikulum fleksibel, dan RPL)	Koordinasi dengan Dekan mempersiapkan Laman resmi fakultas yang memuat data dan informasi publik. dan Dokumen kebijakan/ SOP publikasi data.	Koordinasi dengan Dekan menyiapkan laman resmi fakultas yang memuat data dan informasi publik serta dokumen kebijakan/SOP publikasi data
4	Prodi HKI belum memiliki DTPS dengan jabatan fungsional LK	Koordinasi dengan dekan dan kaprodi mendorong DTPS yang sudah memenui syarat agar mengajukan SK Jafung Lektor Kepala	DTPS mengajukan jabatan fungsional LK

No	Temuan	Upaya Tindak Lanjut Auditee	Konfirmasi Tindak Lanjut (Ya/Tidak) disertai bukti
5	UPPS tidak memiliki RKAT	Fakultas dan Prodi membuat RKAT diajukan ke Warek agar di sahkan	UPPS membuat RKAT
6	Tidak ada bukti mahasiswa menyelesaikan kurikulum 2 semester per tahun dengan opsi semester antara sesuai pedoman akademik	Perguruan Tinggi membuat pedoman akademik mengenai semester reguler dan semester antara, termasuk alur penyelesaian kurikulum agar mahasiswa dapat menempuh 2 semester per tahun sesuai kebutuhan	Perguruan Tinggi membuat pedoman akademik mengenai semester reguler dan semester antara, termasuk alur penyelesaian kurikulum agar mahasiswa dapat menempuh 2 semester per tahun sesuai kebutuhan
7	Program studi belum memberikan pilihan tugas akhir dalam bentuk (skripsi, prototipe, proyek, atau sejenis)	Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan pilihan bentuk tugas akhir (skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk lain) dan mensosialisasikannya	Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan pilihan bentuk tugas akhir (skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk lain) dan mensosialisasikannya
8	Tidak ada Panduan orientasi yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi	koordinasi dengan pimpinan terkait kebijakan tentang orientasi yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.	Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan dalam bentuk panduan orientasi yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi
9	Tidak ada dokumen kebijakan dan SOP publikasi data	Kordinasi dengan dekan terkait Laman resmi fakultas yang memuat data dan informasi publik, Dokumen kebijakan/ SOP publikasi data.	UPPS membuat kebijakan tentang publikasi data
10	Tidak ada Pedoman akademik yang mengatur mahasiswa paruh dan penuh waktu	Koordinasi dengan pimpinan terkait Pedoman akademik yang mengatur mahasiswa paruh dan penuh waktu 2. Rekap masa studi mahasiswa	PT membuat kebijakan tentang masa studi mahasiswa paruh dan penuh waktu
11	Data Prodi HKI menunjukkan kekurangan jumlah Doktor	Kordinasi dengan dekan dan dosen prodi mendorong studi S3	UPPS mendorong DTSPS untuk studi S3 dan memotivasi DTSPS yang masih masa studi S3 untuk lulus tepat waktu
12	UPPS tidak memiliki analisis kebutuhan formasi dosen dan tendik	Sudah ada Pedoman SDM Fakultas	UPPS melakukan analisis kebutuhan formasi dosen dan tendik
13	PT hanya memiliki SOP keuangan tapi tidak memiliki laporan audit keuangan yang menunjukkan tidak ada temuan penyimpangan	Koordinasi PT agar membuat laporan audit keuangan	PT membuat laporan audit keuangan yang menunjukkan tidak ada temuan penyimpangan
14	PT belum memiliki pedoman K3 (kesehatan, keselaamatan, dan keamanan) dan disosialisasikan kepada civitas akademika	Koordinasi Agar PT memiliki pedoman K3 (kesehatan, keselaamatan, dan keamanan) dan disosialisasikan kepada civitas akademika	PT membuat pedoman K3 (kesehatan, keselaamatan, dan keamanan) dan disosialisasikan kepada civitas akademika

No	Temuan	Upaya Tindak Lanjut Auditee	Konfirmasi Tindak Lanjut (Ya/Tidak) disertai bukti
15	prodi HKI belum mempunyai dokumen standar pembiayaan yang disahkan	koordinasi dengan UPPS agar mempunyai dokumen standar pembiayaan yang telah disahkan	Koordinasi dengan PT untuk membuat dokumen standar pembiayaan
16	UPPS belum melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut terhadap sarpras	Kordinasi dengan UPPS agar UPPS melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut terhadap sarpras kemudian membuat laporannya	UPPS melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut terhadap sarpras kemudian membuat laporannya
17	Belum tersedia laporan tracer study yang memuat data persentase lulusan yang terserap di dunia kerja atau studi lanjut dalam 6 bulan pertama, karena Prodi HKI belum melaksanakan tracer study untuk lulusan 2024	Melakukan koordinasi dengan bagaian tracer BAAK	Prodi dapat memanfaatkan kanal komunikasi alumni (grup WhatsApp, media sosial, atau database CDC/kemahasiswaan) untuk mengumpulkan data awal secara sederhana sambil menunggu tracer study formal pada tahun kedua
18	Belum tersedia laporan tracer study yang memuat data rerata masa tunggu kerja mahasiswa	Prodi akan melaksanakan Tracer study 2 tahun setelah kelulusan,	Prodi dapat memanfaatkan kanal komunikasi alumni (grup WhatsApp, media sosial, atau database CDC/kemahasiswaan) untuk mengumpulkan data awal secara sederhana sambil menunggu tracer study formal pada tahun kedua
19	Belum tersedia laporan tracer study yang memuat data presentase kesesuaian kerja mahasiswa dengan Prodi	Prodi akan melakukan Tracer Study setelah alumni lulus 2 tahun	Prodi dapat memanfaatkan kanal komunikasi alumni (grup WhatsApp, media sosial, atau database CDC/kemahasiswaan) untuk mengumpulkan data awal secara sederhana sambil menunggu tracer study formal pada tahun kedua
20	Belum tersedia laporan tracer study di Prodi	Prodi melaksanakan tracer study 2 tahun setelah kelulusan	Prodi dapat memanfaatkan kanal komunikasi alumni (grup WhatsApp, media sosial, atau database CDC/kemahasiswaan) untuk mengumpulkan data awal secara sederhana sambil menunggu tracer study formal pada tahun kedua
21	Belum tersedia laporan kepuasan pengguna lulusan	Prodi melaksanakan tracer study 2 tahun setelah kelulusan	Prodi dapat memanfaatkan kanal komunikasi alumni (grup WhatsApp, media sosial, atau database CDC/kemahasiswaan) untuk mengumpulkan data awal secara sederhana sambil menunggu tracer study formal pada tahun kedua

No	Temuan	Upaya Tindak Lanjut Auditee	Konfirmasi Tindak Lanjut (Ya/Tidak) disertai bukti
22	Belum tersedia laporan tracer study yang memuat data presentase lulusan yang bekerja sesuai profil lulusan	Prodi melaksanakan tracer studi setelah 2 tahun kelulusan	Prodi dapat memanfaatkan kanal komunikasi alumni (grup WhatsApp, media sosial, atau database CDC/kemahasiswaan) untuk mengumpulkan data awal secara sederhana sambil menunggu tracer study formal pada tahun kedua
23	Belum tersedia laporan tracer study yang memuat data lama lulusan memperoleh pekerjaan pertama	Prodi melaksanakan tracer studi setelah 2 tahun kelulusan	Prodi dapat memanfaatkan kanal komunikasi alumni (grup WhatsApp, media sosial, atau database CDC/kemahasiswaan) untuk mengumpulkan data awal secara sederhana sambil menunggu tracer study formal pada tahun kedua
24	Belum tersedia laporan kepuasan pengguna lulusan yang memuat data rata-rata tingkat kepuasan pengguna terhadap lulusan	Prodi melaksanakan tracer studi setelah 2 tahun kelulusan	Prodi dapat memanfaatkan kanal komunikasi alumni (grup WhatsApp, media sosial, atau database CDC/kemahasiswaan) untuk mengumpulkan data awal secara sederhana sambil menunggu tracer study formal pada tahun kedua
25	Belum tersedia laporan tracer study di Prodi	Prodi melaksanakan tracer studi setelah 2 tahun kelulusan	Prodi dapat memanfaatkan kanal komunikasi alumni (grup WhatsApp, media sosial, atau database CDC/kemahasiswaan) untuk mengumpulkan data awal secara sederhana sambil menunggu tracer study formal pada tahun kedua
26	Tidak ada bukti dokumentasi adanya kebebasan akademik, mimbar akademik, otonomi keilmuan seluruh civitas akademika	Kordinasi Agar Perguruan Tinggi menyusun dan mensosialisasikan kebijakan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan	Perguruan Tinggi menyusun dan mensosialisasikan kebijakan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan
27	PT belum pedoman/aturan penerimaan mahasiswa baru.	koordinasi dengan PT agar mempunyai dan membuat pedoman/aturan penerimaan mahasiswa baru	PT membuat pedoman/aturan penerimaan mahasiswa baru
28	DTPS belum mempunyai penelitian yang didanai oleh sumber luar negeri	DTPS melakukan penelitian kolaborasi dan didanai oleh luar negeri	DTPS melakukan penelitian kolaborasi dan didanai oleh luar negeri
29	UPPS belum memiliki penelitian yang didanai sumber luar negeri	ada 3 penelitian DTPS yang dibiayai oleh eksternal dalam negeri	DTPS melakukan penelitian dengan sumber dana dari luar negeri

No	Temuan	Upaya Tindak Lanjut Audit	Konfirmasi Tindak Lanjut (Ya/Tidak) disertai bukti
30	DTPS belum memiliki HAKI dalam bidang penelitian	UPPS membuat pasal tentang pengelolaan HAKI dalam buku pedoman penelitian dan PKM	UPPS menambahkan pasal tentang pengelolaan HAKI dalam buku pedoman penelitian dan PKM
31	PT belum membuat pasal tentang peraturan pengelolaan dan kepemilikan HaKI dan ketentuan dalam kerjasama penelitian	PT menambahkan pasal tentang peraturan pengelolaan dan kepemilikan HaKI dan ketentuan dalam kerjasama penelitian	PT menambahkan pasal tentang peraturan pengelolaan dan kepemilikan HaKI dan ketentuan dalam kerjasama penelitian
32	UPPS belum memiliki Kebijakan mengenai tugas, hak dan kewajiban penelitian	Koordinasi dengan UPPS terkait dengan peraturan tersebut	UPPS membuat Kebijakan mengenai tugas, hak dan kewajiban tim peneliti
33	UPPS belum menerapkan sistem berbasis TIK yang terintegrasi untuk mendukung seluruh aktifitas penelitian. Target: 1) 100% penelitian terdokumentasi di sistem TIK. 2) Reposisori penelitian dapat diakses 24/7	UPPS membuat sistem berbasis TIK yang terintegrasi untuk mendukung seluruh aktifitas penelitian. Target: 1) 100% penelitian terdokumentasi di sistem TIK. 2) Reposisori penelitian dapat diakses 24/7	UPPS membuat sistem berbasis TIK yang terintegrasi untuk mendukung seluruh aktifitas penelitian. Target: 1) 100% penelitian terdokumentasi di sistem TIK. 2) Reposisori penelitian dapat diakses 24/7
34	UPPS belum menerapkan sistem berbasis TIK yang terintegrasi untuk mendukung seluruh aktifitas PkM? Target: 1) 100% PkM terdokumentasi di sistem TIK. 2) Reposisori PkM dapat diakses 24/7	UPPS membuat sistem berbasis TIK yang terintegrasi untuk mendukung seluruh aktifitas PkM? Target: 1) 100% PkM terdokumentasi di sistem TIK. 2) Reposisori PkM dapat diakses 24/7	UPPS membuat sistem berbasis TIK yang terintegrasi untuk mendukung seluruh aktifitas PkM? Target: 1) 100% PkM terdokumentasi di sistem TIK. 2) Reposisori PkM dapat diakses 24/7
35	DTPS belum mempunyai PKM yang didanai oleh sumber luar negeri/internasional	ada DTPS PkM yang didanai eksternal dalam negeri	DTPS melakukan PKM dengan peneliti dari luar negeri
36	DTPS prodi HKI hanya memiliki 2 logbook PKM	UPPS membuat kebijakan tentang pembuatan logbook PKM	UPPS membuat kebijakan tentang pembuatan logbook PKM
37	UPPS tidak memiliki kebijakan mengenai tugas, hak dan kewajiban tim peneliti dan PKM	UPPS sudah membuat kebijakan mengenai tugas, hak dan kewajiban tim peneliti dan PKM	PT menambahkan pasal tentang pengaturan tupoksi tim peneliti

C. Kesimpulan dan Hasil Audit Mutu Internal

Skor Hasil AMI (%)	Skor Hasil Temuan (%)	Skor Observasi (%)	Skor Minor (%)	Skor Mayor (%)
65.09%	34.91%	0%	25.47%	9.44%

Tuban, 25 January 2026

Pimpinan Auditie,



(Rinwanto, S.Sy, M.H)

Tuban, 25 January 2026

Ketua Auditor,



(Nur Hidayatul Istiqomah, S.E., M.M.)

Tuban, 25 January 2026

Kapus Audit,



(Irfa'i Alfian Mubaidilla, M.Pd.)